Science and Education Journal
Vol 5 No 3 (2026)
E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Representasi Kebijakan Normalisasi Sungai Kali Gabus Dalam Komunikasi Multimodal Pemerintah Di Media Sosial Instagram Dan Youtube

Natasya Margareth[1], Eka Yulyana[2], Mochammad Faizal Rizki[3]
[1,2,3]Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, natasyamargareth26@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi kebijakan normalisasi Sungai Kali Gabus dalam komunikasi multimodal pemerintah melalui media sosial Instagram dan YouTube. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi kebijakan pemerintah, sementara kajian mengenai representasi kebijakan infrastruktur melalui pendekatan komunikasi kritis masih relatif terbatas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan paradigma kritis. Analisis data dilakukan menggunakan Multimodal Critical Discourse Analysis (MCDA) berdasarkan kerangka Kress dan van Leeuwen. Data penelitian terdiri atas dua unggahan Instagram dan satu video YouTube resmi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat sebagai data utama, serta satu konten TikTok dan satu video YouTube sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa normalisasi Sungai Kali Gabus direpresentasikan sebagai solusi teknis untuk mengatasi banjir melalui dominasi visual alat berat, aktivitas pengerukan sungai, dan kehadiran aparatur pemerintah. Representasi tersebut menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam penyelesaian masalah publik serta memperkuat legitimasi kebijakan melalui kombinasi elemen visual, verbal, dan audiovisual, sementara representasi masyarakat terdampak memperoleh ruang yang lebih terbatas. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan MCDA relevan digunakan dalam kajian Ilmu Pemerintahan untuk membaca relasi kekuasaan yang bekerja melalui komunikasi digital pemerintah.

Kata Kunci: *Normalisasi Sungai, Komunikasi Kebijakan, Representasi, Media Sosial Pemerintah, Multimodal Critical Discourse Analysis*.

Abstract

This study aims to analyze the representation of the Kali Gabus River normalization policy in the government's multimodal communication through the social media platforms Instagram and YouTube. The study is motivated by the increasing use of social media as a means of government policy communication, while studies on the representation of infrastructure policy through a critical communication approach remain relatively limited. This research employs a qualitative approach with a case study design and a critical paradigm. Data analysis was conducted using Multimodal Critical Discourse Analysis (MCDA) based on the framework of Kress and van Leeuwen. The research data consist of two Instagram uploads and one YouTube video from the official account of the West Java Provincial Water Resources Agency as the primary data, along with one TikTok content and one YouTube video as supporting data. The results show that the normalization of the Kali Gabus River is represented as a technical solution to flooding through the visual dominance of heavy equipment, river dredging activities, and the presence of government officials. This representation positions the government as the principal actor in resolving public problems and strengthens policy legitimacy through the combination of visual, verbal, and audiovisual elements, while the representation of affected communities receives comparatively limited space. The study indicates that the MCDA approach is relevant for Government Studies in reading the power relations operating through government digital communication.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Keywords: *River Normalization, Policy Communication, Representation, Government Social Media, Multimodal Critical Discourse Analysis.*

Corresponding Author:
Natasya Margareth

Universitas Singaperbangsa Karawang; natasyamargareth26@gmail.com

PENDAHULUAN

Media sosial saat ini bukan lagi sekadar sarana penyampaian informasi, tetapi telah menjadi ruang strategis bagi pemerintah untuk membangun makna, membentuk persepsi publik, serta memperkuat legitimasi kebijakan publik (Fairclough, 1995; Möller, 2021). Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Dinas Sumber Daya Air (DSDA), memanfaatkan akun Instagram resmi @dsda.jabar serta kanal YouTube resmi pemerintah untuk mempublikasikan kegiatan normalisasi Sungai Kali Gabus di wilayah Bekasi. Kebijakan normalisasi sungai ini mencakup pengerukan sedimentasi, pelebaran dan pendalaman alur sungai, serta penataan bantaran sungai dengan tujuan mengembalikan kapasitas aliran air dan mengurangi potensi banjir (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 2021).

Dalam diskursus kebijakan publik, normalisasi sungai kerap diposisikan sebagai solusi teknokratis yang rasional, objektif, dan berbasis keahlian teknis. Namun, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis dan lingkungan, tetapi juga menyentuh ruang hidup masyarakat yang bermukim di sekitar bantaran sungai. Normalisasi sungai merupakan kebijakan publik yang sarat dengan dimensi sosial, politik, dan komunikasi, karena berimplikasi langsung terhadap keamanan ruang hidup, mata pencaharian, serta relasi antara pemerintah dan masyarakat terdampak. Kompleksitas ini menempatkan normalisasi sungai sebagai arena kebijakan yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga simbolik dan diskursif (Bourdieu, 1991; Flyvbjerg, 2001).

Banjir tercatat sebagai bencana dengan frekuensi kejadian tertinggi di Indonesia beberapa tahun terakhir. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa banjir secara konsisten mendominasi kejadian bencana dan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, serta lingkungan yang signifikan (BNPB, 2025). Penurunan kapasitas sungai akibat pendangkalan, penyempitan alur, serta degradasi daerah aliran sungai menjadi salah satu faktor utama penyebab banjir, yang tidak terlepas dari kebijakan tata ruang, alih fungsi lahan, serta pola pembangunan wilayah perkotaan (Ridwan & Sarjito, 2024).

Instagram dan YouTube dipilih dalam penelitian ini karena kedua platform tersebut memungkinkan pemerintah menyampaikan pesan kebijakan melalui kombinasi gambar, video, narasi lisan, dan teks secara simultan. Praktik komunikasi multimodal ini memberi keleluasaan bagi pemerintah untuk menampilkan realitas kebijakan dalam bentuk yang terkurasi dan terkontrol, namun pada saat yang sama membuka ruang bagi pembentukan wacana tertentu mengenai kebijakan publik (Kress & van Leeuwen, 2006). Media sosial telah menjadi bagian integral dari sistem komunikasi pemerintahan yang bersifat hibrid, di mana proses komunikasi politik dan kebijakan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada mediasi media massa konvensional (Chadwick, 2013; Mergel, 2013).

Dalam kajian komunikasi visual dan wacana kritis, visual dan narasi tidak dipandang sebagai representasi realitas yang netral, melainkan hasil dari proses seleksi,

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

penonjolan, dan penghilangan aspek tertentu dari realitas sosial (Kress & van Leeuwen, 2006; Machin & Mayr, 2012). Visualisasi pembangunan infrastruktur, termasuk normalisasi sungai, berfungsi sebagai instrumen simbolik yang dapat membangun citra kompetensi birokrasi, menunjukkan kehadiran negara di ruang publik, serta memperkuat legitimasi kebijakan di mata masyarakat (Rose, 2016).

Sejumlah pemberitaan media dan diskursus publik menunjukkan bahwa pelaksanaan normalisasi Kali Gabus tidak sepenuhnya bebas dari konflik dan perbedaan kepentingan terkait dampak sosial, keamanan ruang hidup, serta partisipasi warga. Namun, dinamika sosial dan konflik kebijakan tersebut cenderung tidak tampil secara utuh dalam representasi resmi pemerintah di media sosial, yang lebih menonjolkan narasi keberhasilan teknis dan capaian pembangunan. Penelitian ini tidak berfokus pada evaluasi teknis efektivitas normalisasi sungai, melainkan pada cara kebijakan tersebut dikomunikasikan, yaitu apa yang ditampilkan, apa yang ditonjolkan, dan apa yang tidak ditampilkan dalam komunikasi resmi pemerintah.

Meskipun normalisasi sungai telah banyak dikaji dalam konteks teknis dan lingkungan, kajian yang menempatkan normalisasi sungai sebagai praktik diskursif dan komunikasi kebijakan masih relatif terbatas. Penggunaan pendekatan Multimodal Critical Discourse Analysis (MCDA) dalam mengkaji komunikasi kebijakan infrastruktur di tingkat pemerintah daerah di Indonesia juga belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji representasi normalisasi Sungai Kali Gabus melalui komunikasi multimodal pemerintah di Instagram dan YouTube, serta mengungkap bagaimana makna, legitimasi, dan relasi kuasa dibangun melalui representasi visual dan narasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan normalisasi Sungai Kali Gabus direpresentasikan melalui komunikasi multimodal pemerintah di media sosial Instagram dan YouTube, serta bagaimana representasi tersebut membangun makna, legitimasi, dan relasi kuasa dalam kebijakan publik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis representasi tersebut, mengungkap strategi visual dan elemen multimodal yang digunakan untuk membangun makna dan legitimasi kebijakan, serta mengidentifikasi aspek kebijakan yang ditonjolkan maupun direduksi dalam komunikasi resmi pemerintah. Dengan menggunakan pendekatan MCDA yang merujuk pada kerangka Kress dan van Leeuwen (2006), penelitian ini menempatkan komunikasi pemerintah bukan sebagai praktik netral, melainkan sebagai bagian integral dari proses kebijakan itu sendiri.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji secara mendalam praktik komunikasi kebijakan pemerintah dalam konteks normalisasi Sungai Kali Gabus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemaknaan, interpretasi, dan pemahaman terhadap proses representasi serta relasi kekuasaan yang bekerja dalam komunikasi kebijakan, bukan pada pengukuran variabel secara kuantitatif (Creswell, 2014). Penelitian ini menempatkan dirinya dalam paradigma kritis, yang memandang komunikasi pemerintah sebagai praktik yang sarat dengan relasi kuasa, ideologi, dan kepentingan, bukan sebagai proses penyampaian informasi yang netral (Fairclough, 1995).

Objek penelitian adalah akun Instagram resmi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat (@dsda.jabar) dan kanal YouTube resmi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Data utama penelitian terdiri atas dua unggahan reel Instagram dan satu video YouTube yang menampilkan kegiatan normalisasi Sungai Kali Gabus pada tahun 2025. Sebagai data pendukung, penelitian ini juga menggunakan satu konten TikTok dari

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

akun DSDA Jabar dan satu video YouTube dari kanal Kang Dedi Mulyadi, yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya dengan tema normalisasi Sungai Kali Gabus untuk melihat konsistensi representasi kebijakan pada berbagai platform.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi terhadap konten digital yang telah tersedia secara terbuka dan dapat diakses publik. Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi akun media sosial resmi pemerintah, penelusuran dan seleksi konten berdasarkan tema kebijakan dan elemen multimodal yang relevan, pendokumentasian dan pengarsipan konten terpilih (tangkapan layar, tautan, dan unduhan video) disertai pencatatan metadata, serta pencatatan dan klasifikasi elemen multimodal yang meliputi aspek visual (objek, sudut pengambilan gambar, komposisi visual, simbol institusional), aspek verbal (caption, judul dan deskripsi video, teks overlay), dan aspek audio (musik latar, suara narator, suara lapangan).

Teknik analisis data menggunakan pendekatan Multimodal Critical Discourse Analysis (MCDA) yang mengacu pada kerangka tata bahasa visual Kress dan van Leeuwen (2006). Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi unit analisis dari setiap konten, analisis representasi visual berdasarkan tiga dimensi makna (representational meaning, interactive meaning, dan compositional meaning), analisis teks dan narasi kebijakan yang menyertai konten, analisis relasi kuasa dan legitimasi kebijakan yang mengacu pada pemikiran Foucault (1980) dan Bourdieu (1991), analisis komentar publik sebagai diskursus alternatif terhadap narasi resmi pemerintah, serta penarikan kesimpulan analitis melalui sintesis temuan dari seluruh tahap analisis.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui kriteria credibility, transferability, dependability, dan confirmability sebagaimana dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985). Kredibilitas dijaga melalui triangulasi data antarplatform media sosial dan triangulasi metode dengan menganalisis secara bersamaan elemen visual, teks, narasi audiovisual, serta komentar publik. Transferability dijaga melalui penyajian deskripsi kontekstual yang rinci mengenai latar kebijakan dan karakter komunikasi pemerintah. Dependability dijaga melalui dokumentasi tahapan penelitian yang sistematis, sementara confirmability dijaga melalui refleksivitas peneliti dan keterkaitan yang jelas antara data empiris dan interpretasi analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media Sosial Pemerintah dalam Representasi Normalisasi Sungai Kali Gabus

Media sosial dalam konteks pemerintahan digital saat ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah untuk membangun citra, membentuk opini publik, serta memperkuat legitimasi kebijakan publik. Perkembangan teknologi komunikasi digital mendorong institusi pemerintah memanfaatkan media sosial sebagai instrumen komunikasi publik yang lebih cepat, visual, interaktif, dan mudah dijangkau masyarakat (Mergel, 2013). Akun Instagram @dsda.jabar dan kanal YouTube resmi pemerintah digunakan sebagai objek utama penelitian ini karena keduanya secara konsisten mempublikasikan dokumentasi kegiatan normalisasi Kali Gabus, mencakup aktivitas aparatur pemerintah, penggunaan alat berat, proses pengerukan sungai, serta visualisasi kondisi sungai sebelum dan sesudah normalisasi.

Instagram menampilkan visual singkat dan padat yang menonjolkan kondisi sebelum dan sesudah normalisasi serta kehadiran aparatur negara di lapangan, sementara YouTube memungkinkan penyampaian narasi kebijakan yang lebih panjang melalui kombinasi visual bergerak, narasi verbal, musik latar, dan teks penjelas. Dalam video-video yang dianalisis, pemerintah direpresentasikan sebagai aktor utama yang aktif

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

bekerja menyelesaikan persoalan banjir dan penataan sungai, sementara konflik sosial dan resistensi masyarakat direpresentasikan secara terbatas.

Elemen Visual: Representasi Sungai Bermasalah dan Alat Berat sebagai Solusi

Berdasarkan hasil analisis representational meaning, visual alat berat merupakan elemen yang paling dominan ditampilkan dalam representasi normalisasi Sungai Kali Gabus. Excavator, truk pengangkut material, dan alat pengeruk sedimentasi secara konsisten muncul dalam berbagai unggahan, ditempatkan pada posisi visual yang menonjol dengan sudut pengambilan gambar yang memperlihatkan skala besar pekerjaan normalisasi. Visual alat berat tersebut dikombinasikan dengan kondisi sungai yang dipenuhi lumpur, sedimentasi, dan sampah, sehingga membangun citra bahwa sungai berada dalam kondisi bermasalah dan membutuhkan intervensi pemerintah.

Pola visual before-after menjadi salah satu bentuk representasi yang dominan: kondisi sebelum normalisasi ditampilkan dengan sungai yang sempit dan keruh, sedangkan kondisi setelah normalisasi ditampilkan dengan aliran yang lebih terbuka dan area bantaran yang lebih tertata. Dalam perspektif information value Kress dan van Leeuwen (2006), susunan visual semacam ini menciptakan hubungan sebab-akibat yang sederhana, yaitu sungai digambarkan sebagai sumber masalah, sementara normalisasi direpresentasikan sebagai solusi yang efektif, sehingga berfungsi sebagai mekanisme persuasi yang memperkuat narasi keberhasilan kebijakan (Rose, 2016).

Aparatur pemerintah juga menjadi elemen visual yang dominan, umumnya ditampilkan melakukan peninjauan lapangan, mengawasi pengerukan, atau berdiri di sekitar alat berat — memperlihatkan representasi pemerintah sebagai aktor yang aktif bekerja dan hadir langsung di lapangan. Sebaliknya, masyarakat cenderung muncul dalam porsi terbatas, lebih banyak sebagai latar aktivitas atau pihak yang menyaksikan proses pengerjaan, dengan fokus visual yang tetap berpusat pada aktivitas pemerintah. Dari aspek teknik visual, penggunaan long shot dan drone shot memperlihatkan skala proyek secara luas, sementara close-up shot terhadap alat berat dan aktivitas pengerukan memperkuat fokus perhatian audiens terhadap proses teknis normalisasi (Kress & van Leeuwen, 2006).

Elemen Verbal, Audio, dan Audiovisual: Bahasa Teknokratis dan Legitimasi

Caption Instagram dan narasi video YouTube cenderung menggunakan bahasa formal, administratif, dan teknokratis. Istilah seperti “normalisasi sungai”, “penanganan banjir”, “pengendalian banjir”, “penertiban bangunan”, dan “optimalisasi aliran sungai” muncul secara berulang, menunjukkan bagaimana komunikasi pemerintah membingkai normalisasi sungai sebagai kebutuhan teknis dan solusi rasional. Frasa seperti “demi kepentingan masyarakat” dan “untuk mengurangi risiko banjir” memperlihatkan upaya legitimasi kebijakan melalui bahasa yang menempatkan pemerintah sebagai aktor yang bekerja untuk kepentingan publik (Fairclough, 1995). Penggunaan hashtag seperti #NormalisasiSungai dan #PengendalianBanjir memperkuat konsistensi narasi pembangunan dan memperluas jangkauan wacana kebijakan di ruang digital (Zappavigna, 2018).

Pada elemen audiovisual, voice over dengan intonasi formal namun persuasif mendominasi narasi video, menjelaskan normalisasi sebagai bentuk penanganan banjir dan upaya menciptakan lingkungan yang lebih tertata. Musik instrumental bertempo dinamis turut memperkuat kesan aktivitas pembangunan yang serius dan progresif, sementara suara alat berat yang dipertahankan secara natural menciptakan kesan realistis atas aktivitas lapangan (Machin, 2010). Wawancara pejabat pemerintah, yang umumnya diambil dengan medium shot di lokasi proyek, memperlihatkan otoritas dan posisi

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

penting pemerintah dalam narasi kebijakan, sementara suara masyarakat muncul dalam porsi yang jauh lebih terbatas dan lebih banyak ditampilkan secara visual dibandingkan secara verbal.

Interactive dan Compositional Meaning: Relasi Pemerintah-Audiens dan Hierarki Visual

Melalui analisis interactive meaning, ditemukan bahwa hubungan yang dibangun antara konten dan audiens menempatkan pemerintah sebagai aktor yang memiliki otoritas dan legitimasi dalam menangani persoalan publik. Sudut pengambilan gambar, fokus visual, dan narasi yang disampaikan menciptakan kesan bahwa pemerintah hadir secara langsung dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, sehingga audiens diarahkan untuk memahami dan menerima posisi pemerintah sebagai pihak yang berwenang dan kompeten.

Analisis compositional meaning menunjukkan adanya hierarki representasi yang konsisten: pemerintah dan aktivitas normalisasi memperoleh ruang visual yang dominan dalam frame, sementara masyarakat cenderung berada pada posisi periferal atau bahkan tidak ditampilkan dalam beberapa konten. Komposisi visual tidak hanya menentukan apa yang terlihat, tetapi juga menentukan siapa yang dianggap penting untuk dilihat (Machin & Mayr, 2012). Ketika pemerintah terus ditempatkan sebagai pusat perhatian visual, audiens cenderung memahami normalisasi Sungai Kali Gabus terutama dari sudut pandang institusional pemerintah, sejalan dengan pandangan Fairclough (1995) bahwa praktik representasi media berperan dalam membentuk dan mempertahankan relasi kuasa tertentu.

Legitimasi Kebijakan dan Relasi Kuasa dalam Komunikasi Multimodal Pemerintah

Komunikasi mengenai normalisasi Sungai Kali Gabus tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme legitimasi kebijakan. Legitimasi tersebut dibangun melalui kombinasi elemen visual, verbal, dan audiovisual yang secara konsisten menampilkan normalisasi sebagai tindakan yang diperlukan, rasional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sejalan dengan konsep legitimasi Suchman (1995), komunikasi multimodal pemerintah berperan membangun persepsi bahwa tindakan institusi sesuai dengan nilai dan harapan yang berlaku di masyarakat, dengan menghadirkan normalisasi sebagai solusi yang rasional dan bermanfaat bagi kepentingan publik.

Dari perspektif relasi kuasa, pemerintah menempati posisi dominan dalam keseluruhan representasi kebijakan, baik melalui elemen visual, verbal, maupun audiovisual. Foucault (1980) menjelaskan bahwa relasi kuasa tidak selalu hadir melalui tindakan koersif, melainkan juga melalui produksi pengetahuan dan pembentukan wacana; kekuasaan bekerja dengan menentukan cara suatu realitas dipahami dan dijelaskan kepada publik. Melalui kontrol atas akun media sosial resmi, pemerintah memiliki kewenangan untuk memilih informasi yang ditampilkan, menentukan aktor yang memperoleh visibilitas, serta membingkai peristiwa sesuai narasi yang ingin dibangun.

Masyarakat memang muncul dalam beberapa konten, terutama ketika proses penertiban atau pembongkaran bangunan dilakukan, tetapi lebih sering direpresentasikan sebagai objek kebijakan dibandingkan sebagai subjek yang memiliki agensi untuk menyampaikan pandangan atau kepentingannya sendiri. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan reduksi terhadap konflik sosial dan keterbatasan representasi suara masyarakat dalam komunikasi kebijakan resmi pemerintah. Menurut Hall (1997), representasi tidak pernah menjadi cerminan langsung dari realitas, melainkan hasil

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

konstruksi makna melalui proses seleksi dan penafsiran; apa yang ditampilkan dalam media sama pentingnya dengan apa yang tidak ditampilkan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa komunikasi multimodal pemerintah mengenai normalisasi Sungai Kali Gabus berfungsi bukan hanya sebagai media informasi, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan makna dan legitimasi kebijakan yang secara konsisten memprioritaskan narasi keberhasilan teknis pemerintah, sementara kompleksitas sosial yang menyertai kebijakan kurang memperoleh ruang representasi yang setara.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa representasi normalisasi Sungai Kali Gabus dalam komunikasi multimodal pemerintah melalui Instagram dan YouTube dibangun melalui kombinasi elemen visual, verbal, dan audiovisual yang saling mendukung dalam membentuk makna tertentu mengenai kebijakan tersebut. Normalisasi sungai direpresentasikan sebagai solusi teknis yang diperlukan untuk mengatasi persoalan banjir, diperkuat melalui dominasi visual alat berat, aktivitas pengerukan, dan dokumentasi perubahan kondisi sungai sebelum dan sesudah normalisasi.

Melalui analisis representational, interactive, dan compositional meaning, ditemukan bahwa pemerintah secara konsisten direpresentasikan sebagai aktor utama yang memiliki otoritas, kapasitas, dan legitimasi dalam menangani persoalan banjir, sementara masyarakat terdampak memperoleh ruang representasi yang lebih terbatas dan lebih sering ditempatkan sebagai objek kebijakan dibandingkan sebagai subjek yang memiliki agensi. Penelitian ini juga menemukan adanya kecenderungan reduksi terhadap konflik sosial dalam komunikasi resmi pemerintah, sehingga normalisasi sungai direpresentasikan sebagai proses yang berjalan lancar dan minim permasalahan, meskipun dalam praktiknya kebijakan publik kerap melibatkan kepentingan dan pengalaman sosial yang lebih kompleks.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan Multimodal Critical Discourse Analysis relevan digunakan dalam kajian Ilmu Pemerintahan untuk membaca relasi kekuasaan yang bekerja melalui komunikasi digital pemerintah, sekaligus menjadi bahan refleksi bagi instansi pemerintah agar strategi komunikasi kebijakan ke depan lebih memperhatikan keseimbangan representasi antara capaian pembangunan dan perspektif masyarakat terdampak. Pemerintah daerah disarankan mengembangkan strategi komunikasi kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif, dengan memberikan ruang representasi yang lebih luas bagi pengalaman dan aspirasi masyarakat terdampak. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek kajian pada platform media sosial lain serta mengombinasikan MCDA dengan wawancara atau analisis resepsi audiens untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai respons masyarakat terhadap komunikasi kebijakan pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II atas bimbingan, arahan, dan masukan yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini, serta kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang atas dukungan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

BNPB. (2025). Historis 10 tahun banjir JABODETABEK. Buletin Info Bencana.
Bourdieu, P. (1991). Language and symbolic power. Polity Press.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Chadwick, A. (2013). The hybrid media system: Politics and power. Oxford University Press.
Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. (2021). Pedoman teknis normalisasi sungai. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Fairclough, N. (1995). Critical discourse analysis: The critical study of language. Longman.
Flyvbjerg, B. (2001). Making social science matter. Cambridge University Press.
Foucault, M. (1980). Power/knowledge. Pantheon Books.
Hall, S. (1997). Representation. SAGE Publications.
Kress, G., & van Leeuwen, T. (2006). Reading images (2nd ed.). Routledge.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. SAGE Publications.
Machin, D. (2010). Analysing popular music: Image, sound and text. SAGE Publications.
Machin, D., & Mayr, A. (2012). How to do critical discourse analysis. SAGE Publications.
Mergel, I. (2013). Social media adoption and resulting tactics in the U.S. federal government. Government Information Quarterly, 30(2), 123–130. https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.12.004
Möller, J. (2021). Depoliticization and the rise of digital media. Journal of Political Power, 14(1), 1–20.
Ridwan, M., & Sarjito, J. (2024). Tutupan lahan dan banjir. ENVIRO: Journal of Tropical Environmental Research, 26(1).
Rose, G. (2016). Visual methodologies (4th ed.). SAGE Publications.
Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. Academy of Management Review, 20(3), 571–610. http://www.jstor.org/stable/258788
Yin, R. K. (2018). Case study research and applications (6th ed.). SAGE Publications.
Zappavigna, M. (2018). Searchable talk: Hashtags and social media metadiscourse. Bloomsbury Academic.